



ARAHAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PADA ACARA
PAPARAN PUBLIK PLATFORM NASIONAL
PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PLANAS PRB) dan SEMINAR KEARIFAN
LOKAL
HOTEL BOROBUDUR JAKARTA
28 APRIL 2009

His Excellency, Ambassadors of our best-friend countries or His representatives
Perwakilan Kementerian/Lembaga Pemerintah
Distinguished guests, representatives from United Nations and International
Organizations
Ketua dan Pengurus PLANAS PRB
Perwakilan Pemerintah Daerah
Perwakilan Dunia Usaha
Perwakilan Perguruan Tinggi
Perwakilan Media
Perwakilan Organisasi kemasyarakatan
Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia

Selamat Pagi,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabbarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan hidayah-Nya kita dapat bertemu pada hari ini, berkenaan dengan acara paparan publik (public expose) Pembentukan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (PLANAS PRB) dan Seminar Nasional tentang Kearifan Lokal. Untuk itu dengan mengucapkan **bismillahirochmannirrochim**, Acara Publik ekspose Planas PRB dan Seminar Kearifan Lokal secara resmi dibuka.

Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan beberapa informasi dan pemikiran yang mungkin berguna dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya peran yang dibutuhkan dari PLANAS PB.

Hadirin yang berbahagia,

Hari ini tanggal 28 April 2009 adalah tepat 2 (dua) tahun lebih 2 (dua) hari setelah ulang tahun kelahiran UU 24 tentang Penanggulangan Bencana yang kita sepakati menjadi kerangka sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk itu pada kesempatan ini sudah sepatutnya kita introspeksi dan refeksi diri, sudah sejauhmana kita mengimplementasikan Undang Undang

24/2007 tersebut atau dengan kata lain sudah sejauh mana kita membangun sistem PB di Indonesia. Pembangunan sistem ini sendiri menjadi pekerjaan bersama diantara unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha sebagaimana masing-masing hak dan kewajibannya diatur dalam Undang Undang 24/2007.

Peluncuran atau peresmian PLANAS PRB merupakan salah satu langkah maju dalam pembangunan sistem Penanggulangan yang akan tercatat dalam sejarah penanggulangan bencana. Peresmian ini dapat dipandang sebagai bentuk komitmen seluruh pemangku penanggulangan bencana di Indonesia untuk menjadikan pengurangan risiko bencana menjadi paradigma baru dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia.

Proses penyusunan UU 24 tahun 2007 dan Planas PRB memiliki banyak kesamaan, khususnya partisipasi masyarakat yang tinggi. Sehingga diharapkan semangat tersebut terus terjaga yang tercermin dalam kebersamaan dan keterpaduan dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana. Dengan kebersamaan dan keterpaduan diantara para pelaku penanggulangan bencana, niscaya kompleksitas permasalahan bencana yang semakin meningkat dapat diatasi dengan lebih baik.

Keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana akan tercermin dari meningkatnya ketahanan/ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang berarti peningkatan kesiapsiagaan untuk memprediksi ancaman, mencegah kejadian jika mungkin, atau paling tidak mengurangi kemungkinan dampak bencana, sedangkan jika bencana benar-benar terjadi maka kita harus mampu untuk melakukan tanggap darurat secara efektif dan mampu segera bangkit/recover setelah bencana terjadi. Untuk itu "menuju bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana" menjadi visi kita dalam penanggulangan bencana yang akan tercapai salah satunya melalui upaya pengurangan risiko bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh dan dilaksanakan secara konsisten dan sistematis.

Berbagai pengalaman kejadian bencana menunjukkan bahwa hampir 80% masyarakat terdampak, dapat terselamatkan karena kemampuannya sendiri (self asistance) atau bantuan dari masyarakat sekitarnya. Untuk itu Planas PRB merupakan bentuk forum yang sangat ideal untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan membangkitkan volutarism untuk menangani bencana. Hal ini sejalan dengan amanat dari UU 24/2007 yaitu bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, dimana pemerintah sebagai penanggungjawab utama. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitasi dan memberikan arahan dalam bentuk kebijakan. Sedangkan masyarakat dengan segala pengetahuan dan kemampuannya termasuk pengetahuan dan kearifan lokal yang ada harus secara aktif mengembangkan diri dan wajib untuk turut serta dalam upaya Penanggulangan Bencana. Tanpa upaya bersama yang masif maka harapan kita untuk menuju masyarakat yang tangguh mungkin hanya angan-angan belaka.

Hadirin yang berbahagia,

Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana merupakan suatu mekanisme untuk koordinasi dan arahan kebijakan dalam pengurangan risiko bencana yang melibatkan multi sektor dan multi disiplin dari seluruh

stakeholders termasuk lembaga-lembaga/organisasi kemasyarakatan Nasional maupun Internasional. Platform Nasional ini diharapkan akan mengawal pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kebijakan dan perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Hyogo Framework of Action for Disaster Risk Reduction.

Planas PRB telah terbentuk dengan proses penyusunan yang sangat bernuansa kekeluargaan dan musyawarah sebagaimana budaya dari bangsa kita. Saat ini mungkin keanggotaannya dan program-program kerja masih terbatas, tapi dengan semangat dan komitmen bersama disertai dengan dukungan politik yang kuat, Planas PRB ini akan berfungsi sebagaimana yang kita harapkan.

Kami sangat berharap bahwa Planas PRB ini tidak sekedar organisasi biasa yang seringkali terperangkap ke dalam urusan yang birokratis, tetapi bisa seiring dengan BNPB dalam meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan akuntabilitas dalam prakarsa dan upaya pengurangan risiko bencana. Planas PRB juga kami harapkan mampu memfasilitasi pembentukan forum-forum ditingkat lokal khususnya yang bersifat tematik kebencanaan seperti forum gunung api, forum sungai, forum kebakaran hutan dan lahan dan sebagainya. Kerugian akibat banjir semakin meningkat setiap tahunnya bahkan untuk Bengawan Solo mencapai Rp 1 trilyun/tahun, ini jelas akan berkontribusi dalam menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berarti akan menurunkan tingkat kerentanan dan risiko bencana.

Hadirin yang berbahagia,

Sebagai Negara yang telah turut meratifikasi kesepakatan dunia dalam pengurangan risiko bencana (*Hyogo Frame work for action*) kita akan terus berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana sesuai dengan prioritas aksi yang telah ditetapkan bersama. Adalah salah satu tugas dari PLANAS PRB inilah untuk mengawal komitmen kita dalam menjadikan pengurangan risiko bencana menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita akan kelima butir prioritas aksi pengurangan risiko bencana yang telah kita sepakati adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan, legislasi dan kebijakan untuk memastikan PRB menjadi prioritas utama
2. Identifikasi, kajian risiko dan pengembangan peringatan dini
3. Pemanfaatan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan untuk mengembangkan budaya aman
4. Meredam permasalahan dasar/akar permasalahan
5. Peningkatan Kesiapsiagaan

Saat ini kita telah melaksanakan seluruh butir prioritas aksi tersebut meskipun belum optimal dan merata. Capaian kita dinilai telah cukup baik, sehingga kita mendapat pujian dan apresiasi dari berbagai Negara. Salah satunya kita mendapat kesempatan untuk memaparkan perkembangan dan proses penyusunan Planas PRB dan pembangunan sistem Nasional Penanggulangan bencana pada konferensi Global Platform di Geneva. Tetapi isu kelemahan penanggulangan bencana masih terus secara gencar disuarakan setiap ada bencana di Indonesia. Tuntutan penyelenggaraan penanggulangan

bencana secara lebih baik harus kita tanggapi secara positif dengan tidak saling menyalahkan tetapi dengan upaya bersama untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Ancaman-ancaman baru sebagai akibat dari dampak global warming juga harus menjadi isu utama mengingat ancaman ini berjalan secara perlahan tetapi pasti dan akan menyebabkan meningkatnya risiko bencana khususnya yang terkait dengan Hydrometeorology dan lingkungan. Planas PRB juga harus mengangkat isu ini menjadi prioritas yang harus ditangani secara terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana melalui langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang akan membangun masyarakat yang akrab dengan bencana.

Kegiatan-kegiatan kita dalam pengurangan risiko bencana bukanlah pekerjaan yang cepat dapat terlihat hasilnya, untuk itu komitmen untuk melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana harus terus dikawal dan memerlukan perencanaan program yang terukur melalui indikator-indikator pencapaian yang jelas, dan yang lebih penting lagi perencanaan tersebut harus terintegrasi dalam rencana pembangunan sehingga dapat diimplementasikan.

Berbagai program Pengurangan Risiko Bencana yang telah dan sedang kita laksanakan sebagai perwujudan dari komitmen dalam melaksanakan Hyogo Framework for Action 2005-2015 sbb :

1. Dalam hal legislasi dan kebijakan, Indonesia telah melakukan langkah besar yaitu dengan disahkannya UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta Peraturan-peraturan pendukungnya.
 - a. PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan PB,
 - b. PP 22/2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan bantuan bencana,
 - c. PP 23/2008 tentang Peranserta lembaga Internasional dan lembaga Asing Non Pemerintah dalam PB dan
 - d. Perpres No 8/2008 tentang BNPB

Disamping itu telah pula diterbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri no 46/2008 dan Peraturan Kepala Badan no 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Untuk mempercepat pembentukan BPBD, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan surat edaran yang berisi kemungkinan percepatan pembentukan BPBD melalui keputusan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, sambil menunggu Peraturan Daerah yang penetapannya melalui DPRD.

2. Program Risk assessment dan Peringatan dini telah pula kita laksanakan. Loncatan yang sangat signifikan adalah peluncuran Indonesia Tsunami Early Warning System (INA-TEWS) oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 11 November 2008. Disamping itu peringatan dini ancaman yang lainnya terus dikembangkan
3. Program pendidikan dan pemanfaatan Iptek, telah banyak dilakukan untuk mendukung pembangunan budaya aman dengan saling melakukan tukar informasi dan pengalaman, serta sosialisasi dan edukasi sampai tingkat masyarakat melalui berbagai media.
4. Untuk pengurangan faktor-faktor mendasar penyebab bencana, kita telah memiliki UU 26/2007 tentang tata ruang yang telah mengakomodir atau memberikan perhatian kepada risiko bencana dalam penyusunan rencana tata ruang.

5. Sedangkan untuk peningkatan kesiapsiagaan, program yang sedang dan akan terus kita dorong adalah dilakukan pelatihan dan gladi secara rutin disamping mendorong setiap daerah rawan bencana untuk memiliki kontinjensi plan. Indonesia juga ditunjuk untuk memimpin Indian Ocean Wave 2009 (Gladi Tsunami di negara-negara kawasan Lautan Hindia)

Program atau aktivitas yang saya sebutkan diatas baru sebagian kecil dari aktivitas Aksi Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana direncanakan dalam HFA dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009.

Sedemikian banyak program pengurangan risiko bencana perlu dilaksanakan, dan sedemikian banyak pula pelaku yang terlibat di dalamnya, untuk itu diperlukan pengaturan-pengaturan dan koordinasi yang efektif. Koordinasi, jika hanya mengandalkan mekanisme formal akan sulit dilaksanakan, tetapi jika dilakukan melalui pendekatan dengan mengedepankan networking yang kita bangun melalui forum atau Platform Nasional maka insya Allah akan lebih efektif.

Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Formatur Planas PRB yang telah berhasil menyelesaikan amanah yang diemban dalam menyusun organisasi dan kertas kerja (concept paper) dan menyusun kepengurus Planas PRB. Untuk Pengurus Planas PRB yang baru terbentuk, kami ucapkan selamat dan terimakasih atas komitmennya dalam tugas kemanusiaan ini. Sudah sepatutnya seluruh pihak berkomitmen untuk mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

I would also like to take this opportunity to extend my gratitude and appreciation to all stakeholders involved, who are actors of disaster management in Indonesia, which include civil society forum, academician forum, international community forum, media, government, private sector, and also appointed ambassadors of disaster risk reduction.

Semoga segala prakarsa dan upaya kita dalam meningkatkan kinerja penanggulangan bencana di Indonesia di ridhoi oleh Allah SWT.

Demikian arahan yang dapat saya sampaikan, sekaligus pembukaan secara resmi acara ini.

Wassalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh.

Kepala,

Dr. Syamsul Maarif, MSi